

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang APBD belum maksimal hal ini disebabkan beberapa kendala atau faktor-faktor penghambat dalam implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di kabupaten Lampung Barat berdasarkan model implementasi yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang ditemui dalam Proses Implementasi Kebijakan yaitu :

1. Mudah/Tidaknya Perumusan Implementasi Peraturan Daerah dikendalikan.

Kebijakan mengenai Balanja hibah terhadap Satuan pendidikan SMA di kabupaten Lampung barat relatif mudah karena dalam pengambilan keputusan ada unsur bergaining antara DPRD dan Bupati, lalu dalam pelaksanaan teknis banyak menemui hambatan yaitu dalam memonitor kebutuhan setiap pengalokasiaan Dana pada satuan Pendidikan SMA relative Sulit karena beragamnya objek sasaran, berbedanya jumlah siswa, Banyak pihak yang menghendaki perubahan pendidikan.

3. Kemampuan Perumusan Implementasi Peraturan Bupati untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.

Sesuai dengan aturan yang berlaku yakni peraturan Mendagri Nomor 16 tahun 2006 Perumusan Implementasi Peraturan Bupati meliputi. :

- a. Perumusan Masalah Kebijakan Bupati oleh Tim Koordinasi Satuan Kerja Kabupaten Lampung Barat.

b. Penyusunan Agenda dalam Kebijakan Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

c. Perumusan Usulan Kebijakan Bupati melalui Bappeda dan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat.

d. Proses Pengesahan Kebijakan Bupati melalui biro Hukum dan Organisasi, Asisten I Pemerintahan, dan Sekeretaris Daerah, dan Bupati Kabupaten Lampung Barat

Menstrukturkan Proses Implementasi Peraturan Bupati eksekutif menjabarkan dengan cara menjelaskan dari konsistensi tujuan kebijakan, menggunakan teori Kausal, Ketepatan Alokasi Sumber Dana, Keterpaduan Hiraerki dan diantara badan-badan pelaksana, Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksanaan, Rekriutmen Pejabat pelaksana, dann akses formal dari pihak luar.

4. Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi Perumusan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

a. Faktor Internal

1. Masih terdapatnya pungutan yang di lakukan oleh SMA di Kabupaten Lampung Barat kepada peserta didik hal ini melanggar Peraturan Bupati Nomor 15 Petunjuk Pelaksanaan BDPP Kabupaten Lampung Barat Pasal 15, pungutan tersebut dilakukan oleh SMA dilampung barat karena dalam hal menutupi kekurangan dana APBS sekolah.

2. Kurang optimalnya peran dan fungsi komite sekolah dalam penggalangan dana untuk peduli pendidikan yang kepada masyarakat malah justru kebanyakan komite sekolah hanya dijadikan stempel oleh pihak sekolah untuk melakukan pungutan kepada wali murid.

b. Faktor Eksternal

1. Dewan Pendidikan bersama sama kepala sekolah yang ikut membantu dalam mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan sekolah SMA/SMK Negeri kemudian diusulkan ke dinas BAPPEDA dan Dinas PPKAD untuk diajukan ke DPRD dan disetujui atau disahkan oleh Bupati.
2. Komite Sekolah yang memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada satuan pendidikan dalam mengelola implementasi APBS pada satuan SMA di Kabupaten Lampung Barat, baik dari kondisi sosial ekonomi teknologi, Dukungan Publik, Sikap dan Sumber-sumber yang dimiliki kelompok sasaran, Dukungan dari badan-badan lembaga yang berwenang, Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

B. Saran-Saran

Berdasarkan deskripsi dan Pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka penulis menyarankan: yaitu :

1. Kedepannya agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengupayakan peningkatan Biaya Belanja Hibah untuk Pendidikan SMA dikabupaten Lampung.

Peningkatan tersebut ditekankan biaya untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan Ektrakurikuler, dan Sarana Prasarana, agar dapat mengurangi beban orang tua siswa membiayai sekolah peserta didik.

2. Meningkatkan inisiatif peran komite sekolah dan peserta didik untuk menggalakkan penggalangan Dana kepada masyarakat untuk membantu kekurangan dana sekolah yang mana subdi dari pemerintah belum mampu menutupi sepenuhnya kebutuhan SMA di Kabuapten Lampung Barat.